

**Open Government dalam Perspektif Poststructuralism Bernard Stiegler
(Studi Kasus di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro)**

Open Government in the Perspective of Bernard Stiegler's Poststructuralism
(Case Study in Pejambon Village, Bojonegoro Regency)

✉ **Masadib Akmal Vyandri, Falih Suaedi, Bintoro Wardiyanto**
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

*Open Government,
Pejambon,
Poststructuralism,
Bernard Stiegler.*

Article History:

Received : 26 Jan 2024

Accepted : 31 Mei 2024

Publish : 5 Juni 2024

ABSTRAK:

Penelitian ini ingin mengkaji dan membangun open government dengan menggunakan perspektif dari Bernard Stiegler. Bahwa pemakaian teknologi informasi dalam lingkungan Pemerintahan adalah keharusan dan memberikan manfaat, tapi juga memberikan efek racun. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah artikel kualitatif pada studi kasus dengan analisis data spiral, adapun Langkah analisis, mengorganisir data, membaca dan mencatat ide, mendeskripsikan kode menjadi tema, membangun dan menilai interpretasi, mewakili dan visualisasi data. Temuan artikel ini bahwa framework open government telah memberikan public value di desa Pejambon namun ternyata juga memberikan masalahnya tersendiri. Fokus pada teknologi akan mengesampingkan keberlanjutan. Fokus pada inovasi, akan mengesampingkan pemberdayaan masyarakat. Fokus pada teknologi akan melahirkan kelompok yang termarjinalkan. Oleh karena itu untuk mencapai public value, framework open government harus juga mengembangkan keberlanjutan, minat dan kemampuan masyarakat, adanya keseimbangan kewenangan, dan juga pemerataan.

ABSTRACT:

This research aims to examine and build open government using Bernard Stiegler's perspective. That the use of information technology in the government environment is a necessity and provides benefits, but also has toxic effects. The method used in this article is a qualitative article on a case study with spiral data analysis. The analysis steps include organizing data, reading and recording ideas, describing codes into themes, building and assessing interpretations, representing and visualizing data. The findings of this article are that the open government framework has provided public value in Pejambon village, but it also provides its own problems. A focus on technology will override sustainability. Focusing on innovation will neglect community empowerment. Focusing on technology will create marginalized groups. Therefore, to achieve public value, the open government framework must also develop sustainability, community interest and ability, balance authority, and also equal distribution.

How to Cite:

Vyandri, M. A., Suaedi, F., Wardiyanto, B. (2024). *Open Government dalam Perspektif Poststructuralism Bernard Stiegler (Studi Kasus di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro)*. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(1), 1-20. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.677>.

✉ Corresponding author :

Address : Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya,
Jawa Timur 60115

Email : akmalvyandri@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 1-20

PENDAHULUAN

Open government merupakan salah satu penerapan *e-government*, pada semua level pemerintah dari pusat sampai pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi untuk menerapkan transparansi mengenai anggaran maupun kebijakan, serta mendukung partisipasi terhadap pihak masyarakat juga pihak swasta. Wirtz dan Birkmeyer (2015) menyatakan bahwa penerapan *open government*, meliputi 3 (tiga) pilar yaitu transparansi, partisipasi, dan kolaborasi, serta dukungan dari pilar eksternal meliputi akuntabilitas, regulasi hukum, teknologi. Kepercayaan publik pada pemerintahan akan dapat melahirkan *public and citizen value*, yang merupakan tujuan pokok dari *open government*. Choi dan Berry (2021) menjelaskan bahwa pemerintah berperan meningkatkan sosisl-ekonomi (*public value*) warga masyarakatnya. Penelitian tentang *open government* sudah banyak dilakukan, dan konsep ini memang adalah konsep baru, sehingga masih banyak celah untuk terus dikembangkan dengan menggunakan perpektif, topik, metodologi (Wirtz & Birkmeyer, 2015). Selanjutnya, peneliti menganggap penting untuk menelusuri hasil dari penelitian mengenai *open government* sehingga dapat diketahui ruang penelitian yang belum dikaji untuk dapat menghasilkan temuan baru demi perkembangan *open government*. O'Hara (2015), dalam penelitiannya mengkritik pemikiran rasional modern mengenai pemerintahan digital *open government*. Penelitian Sanabria dkk. (2014) menyatakan implementasi *open government* perlu untuk terus melakukan inovasi teknologi dalam pemerintahan. Selanjutnya, Riarh dan Roy (2014) mengembangkan *open government* dengan menggunakan media sosial. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sanz (2014) menjelaskan transparansi pada kenyataannya akan terbuka hanya untuk beberapa golongan

saja, sehingga menciptakan proses pengucilan social. Lucke dan Grobe (2014) menjelaskan bahwa kolaborasi rentan terhadap manipulasi. Peneliti juga menjelaskan bahwa pemakaian TI juga akan menghadapi perlawanan dari politisi, partai politik, dan administrator. Penelitian Marc Garriga-Portolà dan Júlia López Ventura (2014) menekankan perlu adanya keseimbangan antara teknologi informasi dan kompetensi masyarakat menggunakan teknologi. Penelitian Hansson et al. (2015), menemukan inovasi teknologi ternyata juga memperlebar kesenjangan teknologi. Penelitian Shepherd (2015) menyatakan bahwa birokrasi justru gagal menemukan informasi yang benar. Penelitian Blasio dan Selva (2016) memberi peringatan bahwa ada 2 (dua) model potensi *open government*. Di satu sisi, ada model hegemonik *open government*. Di sisi lain, dapat menyediakan kerangka kebijakan yang tepat dan melahirkan inovasi demokratis melalui kolaborasi. Penelitian dari Fraundorfer (2017) menjelaskan bahwa kerja sama yang bermakna antara pemerintah dan aktor masyarakat sipil dapat mengungkap potensi demokrasi yang luar biasa jika dipraktekan secara serius oleh pemerintah. Wirtz et al. (2016) menemukan fakta ada ketidakseriusan dari birokrasi - pejabat pemerintah. Penelitian Schmidhuber & Hilgers (2018) menemukan ternyata *stakeholders* dapat didorong untuk memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai masalah publik. Amanda Meng et al menjelaskan bahwa bahwa *open government* tidak mampu untuk menjembatani kesenjangan antara terpinggirkan kelompok dan pembuatan kebijakan. Schmidhuber et al. (2019) menjelaskan bahwa dalam *open government*, penting untuk membangun platform dan motivasi dari masyarakat untuk berpartisipasi dan berkolaborasi. Fusi et al. (2023) menjelaskan bahwa *open government* mempunyai peran

penting dalam penyusunan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi stakeholder.

Dari kajian penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa ada penekanan pada pemakaian teknologi dan inovasi teknologi dalam perkembangan *open government*. Intinya peran manusia berpartisipasi dalam pemerintahan tidak dapat dikesampingkan. Transparansi berbasis teknologi agar tercapai dengan efektif, dibutuhkan adanya kemampuan untuk mengakses data, mengolah data, dan menggunakan informasi. Adanya kompetensi pemakaian TI dan informasi data, akan lahir adanya saling ketergantungan antar sector yang dapat membangun jejaring sosial. Meskipun hasil dari beberapa penelitian menekankan pengembangan teknologi, tetapi juga dijelaskan dari beberapa penelitian, bahwa penting juga memperkuat peran dan partisipasi dari berbagai stakeholders. Perlu adanya motivasi dari birokrat untuk menjalankan program *open government*. Pentingnya menciptakan sebuah lingkungan dan platform yang benar-benar baik untuk mempromosikan berbagai proyek kepada berbagai institusi pemerintahan, *stakeholders* untuk meningkatkan kemampuan komponen sipil agar dapat mengakses data sebagai wujud partisipasi. Karena telah ditemukan bahwa ternyata masih ada golongan masyarakat yang tidak dapat mengakses data dan tidak mampu berpartisipasi.

Dari hasil penelitian terdahulu telah ditemukan telah banyak dilakukan penelitian berbasis *open government*. Perbedaan dari artikel ini dengan artikel terdahulu adalah artikel ini ingin mengembangkan *open government* dengan menggunakan perspektif dari Bernard Stiegler. Stiegler sendiri dapat dianggap masuk dalam golongan poststrukturalis karena teorinya berkisar diantara filosofis Perancis, poststukturalis dan kritik secara

umum. Pemikiran Stiegler juga untuk mengkritik dari batas poststrukturalisme (Kouppanou, 2015). Dari sinilah peneliti kelak akan menggunakan perspektif dari Bernard Stiegler. Stiegler (2011) mengatakan perkembangan teknologi digital telah melahirkan hal baru dan standar baru, yang dapat menghilangkan kearifan lokal, menyebabkan adanya golongan yang termarginalkan sekaligus dapat memperkuat hegemoni birokrasi dengan cara menguasai penyebaran data, sehingga hanya data baik dan keberhasilan pemerintah saja yang tersebar, teknologi digital untuk mengurangi kekuatan partisipasi masyarakat karena adanya potensi kesenjangan digital, dan sebagai alat untuk melindungi kepentingan elit politik dan pemilik modal. Bernard Stiegler juga membahas mengenai *pharmakon*. Dalam filsafat, dan teori kritis, *pharmakon* adalah obat, racun, dan kambing hitam (Derrida, 1993). Bagi Derrida, penunjukan Plato dalam menjelaskan *pharmakon* mengungkapkan ambiguitas mendasar bahwa 'racun' juga merupakan 'obat', yaitu adanya potensi yang tidak terduga yang mempengaruhi komunitas (Derrida, 1993). Sedangkan *pharmakon* menurut Stiegler adalah totalitas relasi antara manusia dan teknologi, adanya sebuah racun yang mempengaruhi kehidupan yang terjadi oleh hibridisasi teknologi dengan umat manusia. Pentingnya mengganggu siklus konsumsi yang mendeterminasi kesenjangan ekonomi membangun kritik hubungan antara kapital dan suplementasi teknologi kepada manusia (Abbinnett, 2015). Jadi, dapat dikatakan, *pharmakon* adalah obat sekaligus racun. *Open government* dikatakan dapat menjadikan solusi untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan dan penegakan hukum, tetapi ternyata memiliki dampak buruknya tersendiri serta menghasilkan masalah baru.

Sebelum menerapkan *open government*, Pejambon tidak berbeda dengan

desa lainnya. Pemerintahannya tertutup, dan bergantung pada pertanian. Penerapan *open government* di desa Pejambon secara mandiri mampu menciptakan tatakelola pemerintah desa transparansi, partisipatif dan kolaboratif ketika menerapkan desa berbasis digital (web desa). Motivasi dari Pejambon menerapkan transparansi berdasarkan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, dan UU Desa No 6 Tahun 2014. Awal dari Rencana Aksi (Renaksi) pertama dalam implementasi *open government*, Pemerintah Kabupaten beserta Bojonegoro Institute mengadakan Festival Transparansi yang dihadiri oleh semua desa. Standar yang ditentukan juga sangat *basic*, paling tidak ada baliho yang menjelaskan anggaran desa. Dari festival tersebut, ditemukan bahwa Pejambon melebihi ekspektasi, dan menjadi percontohan bagi desa lain. Berdasarkan dari hasil festival tersebut, Pemerintah Bojonegoro berkolaborasi dengan BI untuk membangun Renaksi *Open Government* dengan menjadikan Pejambon sebagai pilot project bagi desa lain memberikan dampak positif bagi Pejambon. Dengan membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pejambon mendapat perhatian pemerintah pusat dan mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,5 Miliar yang digunakan untuk membangun Wisata Edukasi Desa. Selain itu, dengan berkolaborasi dengan BI yang memiliki koneksi dengan organisasi *open government* seperti *Open Government Partnership* (OGP), Pejambon juga mendapatkan kunjungan dari tim OGP Amerika yang juga memberi kontribusi memberikan pelatihan kepada perangkat desa dan juga membangun koneksi dengan OGP. Kemudian Pejambon juga mampu membangun koneksi dan kepercayaan masyarakat karena Pejambon secara rutin membangun partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat desa dengan 2 media yaitu Musrembang dan Jandom Bareng.

Dapat ditemukan bahwa penerapan transparansi secara mandiri membuka peluang Pejambon untuk membangun koneksi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat, BI, dan juga OGP. Sekaligus dapat membangun inovasi Wisata Edukasi Pejambon. Kemudian dengan membangun partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat, juga menjadi alat untuk membangun koneksi dan kepercayaan masyarakat desa.

Meskipun Pejambon dinilai sukses dalam implementasi *open government* dan tetapi beberapa masalah tetap terjadi dalam implementasinya. Pertama, mengenai proyek OGP di Bojonegoro. OGP di Bojonegoro bisa dibilang cukup sukses. Dapat meraih penghargaan transparansi desa pada tahun 2018 dan 2019, sehingga membuat Pejambon menjadi *pilot project* OGI sebagai model percontohan Pemerintahan Desa di Indonesia. Tetapi karena transisi pergantian kepemimpinan Bupati, proyek yang cukup sukses ini dihentikan. Akibatnya koneksi dengan organisasi OGP yang memiliki kontribusi dalam pemberdayaan perangkat desa menjadi hilang. Ini menunjukkan kepemimpinan memiliki efek penting dalam program pembangunan yang berkelanjutan. Masalah ini harus diatasi karena harus ada pembangunan berkelanjutan jangka panjang meskipun telah terjadi perubahan kepemimpinan. Masalah berikutnya adalah mengenai kesenjangan teknologi. Telah ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang belum mampu menggunakan TI dan juga belum mampu membaca transparansi data di web desa serta tidak terlalu peduli dengan transparansi anggaran, terutama dari golongan perempuan. Hanya beberapa golongan saja yang dapat mengakses data. Kemudian, meskipun ada golongan yang dapat mengakses data, mereka belum tentu mampu untuk menerjemahkan data yang didapat. Akibatnya, transparansi dalam *open government* dapat dianggap hanya

memodernkan penyebaran informasi untuk meningkatkan kepercayaan warga desa. Dalam penyebaran data transparansi disebarkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, hanya data yang bersifat positif saja yang hanya disebarkan, jadi penyebaran informasi di web desa hanya dianggap sebagai propaganda saja. Kemudian meskipun sudah ada sarana pembangunan partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat desa, telah ditemukan bahwa masih ada beberapa golongan yang tidak mau ikut hadir, dan juga telah ditemukan bahwa meskipun ada 2 media Musrebang dan Jandom Bareng, telah ditemukan bahwa keputusan akhir tetap diambil oleh Pemerintah Desa. Kemudian focus dalam pembangunan inovasi juga berpotensi melahirkan kelompok yang termarjinalkan di Pejambon. Pemerintah Desa Pejambon dapat dikatakan mampu membangun inovasi secara mandiri seperti web desa dan Wisata Edukasi Desa. Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa seperti pembuatan surat, dan pelayanan dari Bumdes juga sudah berbasis digital, dan dibangun secara mandiri oleh Pemerintah Desa. Akan tetapi Kelompok Tani masih termarjinalkan. Pemerintah Desa terlalu fokus pada inovasi, tetapi tidak ada kebijakan yang signifikan kepada petani.

Jadi, disinilah letak kebaruan yang akan peneliti bangun. Menggunakan perspektif dari Bernard Stiegler, untuk mengkritik *open government* yang tergantung dengan teknologi informasi, kemudian memberikan antisipasi potensi bahaya pemakaian teknologi dalam pemerintahan yang ternyata dapat menimbulkan masalah. Mencari *pharmakon* untuk mengatasi masalah *open government*: Organisasi dan manajemen sekarang tidak bisa menghindari dari perkembangan teknologi digital. Stiegler (1998) sendiri berpendapat bahwa manusia sangat tergantung pada alat dan teknologi. Sepanjang sejarah, manusia

tidak pernah lepas dari alat dan teknologi. Tetapi, efek dari alat dan teknologi tersebut dapat menimbulkan bencana tersendiri. *Open government* merupakan salah satu solusi pemerintah desa, bahwa penting adanya pembangunan teknologi informasi dan inovasi untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan relasi antar sektor seperti pemerintah, swasta, serta masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan *open government* bukannya tidak mengandung resiko, dan menghasilkan masalah berdasarkan kajian artikel jurnal serta kajian lapangan yang menurut istilah *pharmakon*, yaitu memiliki racun tersendiri yang harus diatasi. Penting adanya pemberdayaan dan pembagian kekuatan antara stakeholder untuk benar-benar membangun kesadaran dalam berpartisipasi, juga dengan adanya keseimbangan kekuatan dan wewenang yang membuat keempat sektor saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga tidak ada pihak yang termarjinalkan. Membangun kepemimpinan yang kuat agar *open government* dapat mencapai keberlanjutan meskipun ada pergantian kepemimpinan, dan juga pentingnya juga pemerataan dalam pengembangan inovasi untuk mempersempit kesenjangan sebagai salah satu pilar pendukung dalam *open government* agar *public value* benar-benar tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

Open Government

Wirtz dan Birkmeyer (2015), menyusun kerangka kerja *open government*. Mereka percaya bahwa *public value* dapat dicapai dengan diterapkannya tiga pilar *open government*: transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Ketiga pilar ini tidak mempengaruhi *public value* dalam isolasi karena mereka dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bernd W. Wirtz dan Steven Birkmeyer mengadopsi faktor pendorong

eksternal yang mendukung 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, regulasi, teknologi, dan kepercayaan kepada pemerintah. Berikut bagan Kerangka kerja *Open Government* yang diajukan. Pilar pertama adalah mengenai transparansi. Transparansi adalah salah satu pilar penting demokrasi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, membangun inovasi, dan meningkatkan pelayanan public (Ruijter et al., 2020). Heimstadt dan Dobusch (2020) menjelaskan jika transparansi dengan dukungan teknologi informasi dapat membangun akuntabilitas.

Pilar yang diadopsi oleh *open government* selanjutnya adalah mengenai partisipasi. Partisipasi adalah konsep dimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui proses diskusi dan deliberatif, sehingga dapat meningkatkan proses demokrasi (Harrison et al., 2011). Selanjutnya partisipasi publik dengan didukung perspektif, keahlian dan kemampuan berbagai stakeholders akan meningkatkan efektivitas dalam kualitas pengambilan keputusan (Krick, 2022). Kolaborasi adalah pilar yang juga diadopsi oleh *open government*. Kolaborasi adalah salah satu bentuk dari partisipasi. Bahwa kolaborasi sebagai bentuk kontemporer demokrasi partisipatif membawa individu-individu dengan keahlian bersama-sama dengan para pembuat keputusan pemerintah untuk menciptakan solusi yang akan diimplementasikan (Ruvalcaba-Gomez et al., 2023). Kemudian Hansson et al. (2015) mengatakan bahwa kolaborasi mengenai aspek deliberatif dengan dukungan media sosial dan teknologi serta informasi dibangun melalui dialog masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan kerangka kerja yang dipakai dalam penelitian ini, *open government* diharapkan dapat menciptakan *public value*. Dengan kata lain, terciptanya *public value* dan inovasi adalah legitimasi dari adanya konsep *open government*.

Public value adalah proses pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dalam proses pemerintahan seperti pengelolaan anggaran, menekankan pemerintahan yang melibatkan representatif dan juga pemerintahan yang lebih deliberative (Moore, 2014). Hartley et al. (2017) menjelaskan bahwa *public value* adalah sebuah nilai yang bersifat universal yang dapat dicapai dengan menggunakan proses deliberative dan kesepakatan bersama, sehingga muncul adanya pembelajaran bersama untuk menciptakan pembangunan dan inovasi bersama. Dapat disimpulkan, *public value* adalah sebuah nilai universal yang dapat dikaji dari berbagai perspektif. Sedangkan jika dikaji melalui perspektif administrasi public atau pemerintahan, *public value* adalah sebuah konsep pemerintahan yang lebih menekankan pada proses keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau pembangunan untuk membangun inovasi, baik dalam mengembangkan pelayanan public, pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan kerangka kerja dari Wirtz dan Birkmeyer (2015), 3 (tiga) pilar *open government* dapat mencapai *public value*, tetapi perlu ada dukungan dari 4 (empat) faktor pendorong eksternal, yaitu Pertama, Teknologi sebagai faktor penting *open government*. Penting adanya investasi infrastruktur teknologi untuk mendukung pemerintahan modern dan meningkatkan interaksi antar stakeholders (Giulio & Vecchi, 2023). Faktor pendorong eksternal kedua adalah regulasi. Dalam implementasi *open government* harus dikendalikan oleh regulasi dan hukum (Egger-Peitler & Polzer, 2014). Faktor pendorong eksternal ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah variabel agar pemerintah ada dorongan untuk meningkatkan pemerintahan yang demokratis dan meningkatkan pelayanan public (Pérez-Durán, 2023). Faktor pendorong eksternal keempat adalah

penerimaan dan kepercayaan. Menurut Writz dan Birkmeyer, (2015), penerimaan dan kepercayaan adalah syarat penting *open government* yang sukses. Mereka memahami “penerimaan” sebagai sejauh mana masyarakat setuju dengan strategi *open government* dan alat pemerintah untuk menerapkan strategi tersebut.

Perspektif Poststrukturalisme Bernard Stiegler

Menurut Stiegler, dan didukung oleh Andre Leroi Gourhan, ada hubungan yang mengikat antara teks dan teknologi. Menurut Stiegler dan juga Heidegger, teks dan teknologi adalah manifestasi dari apparatus yang sama (Kouppanou, 2015) Dalam hal ini, Stiegler memunculkan pertanyaan, mengenai kesadaran dan hominisasi (proses untuk menumbuhkan spesies manusia). Dalam proses evolusi kehidupan, bahwa dalam sepejarah manusia sangat dipengaruhi oleh alat dan juga teknologi. Manusia tidak dapat lepas dan sangat tergantung pada alat dan teknologi (Stiegler, 1998). Dalam konteks ini termasuk juga dalam lingkungan pemerintahan modern sekarang ditentukan lebih oleh teknologi daripada oleh biologi yang menghasilkan pembentukan kebiasaan kehidupan manusia termasuk dalam pemerintahan. Jadi, eksistensi manusia sangat dipengaruhi oleh alat dan teknologi. Seperti ketergantungan alat teknologi dalam pemerintahan yang berpotensi menimbulkan masalah (Abbinnett, 2015)

Dalam filsafat dan teori kritis, *pharmakon* adalah obat, racun, dan kambing hitam (Jacques Derrida, 1993). Bagi Derrida, penunjukan Plato dalam menjelaskan *pharmakon* mengungkapkan ambiguitas mendasar bahwa waktu adalah ‘Racun’ sekaligus ‘obat’. Stiegler menyatakan:

“Pharmakon adalah sesuatu yang memungkinkan perawatan untuk di-

ambil sekaligus dari perawatan yang harus diambil - perasaan perlu untuk diperhatikan: kekuatannya bersifat menyembuhkan sampai batas yang tak terukur. . . bahwa itu juga merusak” (Stiegler, 2013).

Stiegler menjelaskan bahwa kehidupan manusia dan sosial, teks bahasa dan teknologi, pada kenyataannya, memiliki efek racun dan penyembuhan. Jika melihat *open government* dengan perspektif dari Bernard Stiegler, maka peneliti mengadopsi *pharmakon* dari Stiegler. Dalam pemerintahan modern, pemakaian teknologi dalam *open government* akan dapat mendukung transparansi, partisipasi, dan kolaborasi untuk mencapai public value (Wirtz & Birkmeyer, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan inovasi dalam lingkungan pemerintahan memiliki 2 efek. Sebagai obat untuk mengatasi masalah, tetapi juga memberi bencana dan dampak negatif. *Open government* meskipun dapat dianggap dapat mencapai public value, meningkatkan legitimasi pemerintahan, mencegah korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan ternyata memiliki dampak buruknya tersendiri. Inovasi teknologi memberikan dampak buruk dalam pemerintahan, sejarah manusia tidak lepas dari alat dan teknologi, dalam era pemerintahan modern, menurut peneliti pemerintah juga tidak dapat lepas dari teknologi. Tidak ada yang bisa memungkirinya bahwa teknologi dapat dianggap sebagai faktor pendorong untuk mempermudah proses transparansi, partisipasi, dan kolaborasi sebagai obat untuk mengatasi masalah publik. Di pihak, dalam pandangan Stiegler mengenai *pharmakon*, peneliti menganggap penting untuk mengatasi kritik dan masalah yang telah dijelaskan dari *open government* serta dibutuhkan alternatif solusi atau mencari *pharmakon* masalah *open government* ini.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang pernah menerapkan program *open government*. Kemudian secara penelitian ini dilakukan di Desa Pejambon Bojonegoro karena upaya pembangunan Renaksi *Open Government* Bojonegoro harus dimulai dari level Pemerintahan Desa, dan desa Pejambon menjadi *pilot project* atau percontohan bagi desa lainnya di Bojonegoro. Jangka waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan. Yaitu dari November 2020-Februari 2021. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang dilakukan pada *setting* tertentu yang ada pada kondisi kehidupan riil masyarakat. Realitas yang dimaksud berupa investigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya (Finlay, 2006). Dalam artikel ini, peneliti berkonsentrasi pada metode studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada eksplorasi sistem terikat dari waktu ke waktu. Pendekatan ini melalui pengumpulan data terperinci dan mendalam yang melibatkan banyak sumber data informasi. Data pengamatan, wawancara dan dokumen dilaporkan melalui deskripsi kasus sebagai tema berbasis kasus. Peneliti mempelajari kasus secara mendalam mulai dari proses hingga program (Creswell & Poth, 2018). Jadi, artikel ini telah menelusuri secara mendalam Renaksi *Open Government* Pejambon yang pernah dilaksanakan. Untuk populasi data, peneliti menggunakan metode *snowball*. Yang disebut jaringan, rujukan rantai, reputasi, dan didorong oleh informan (Neuman, 2014). Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Dinas Kominfo Dari Kominfo peneliti disarankan untuk melakukan artikel di

Pejambon, karena desa Pejambon menjadi *pilot project* atau percontohan bagi desa lain semenjak kebijakan Renaksi *Open Government*. Peneliti telah menemui Kepala Desa, kemudian setelah menemui Kepala Desa, peneliti mendapatkan akses data dari perangkat desa. Setelah mendapatkan akses dari perangkat desa, peneliti mulai diarahkan untuk wawancara dengan Lembaga Desa, tokoh masyarakat, dan LSM Bojonegoro Institute (BI). Kemudian untuk data sekunder, peneliti mendapatkan data dari dokumen web desa Pejambon. Untuk analisis data, penelitian ini, peneliti mengadopsi analisis data spiral dari Creswell dan Poth (2018). Pertama peneliti mengorganisir data dari hasil wawancara dan dokumen. Kedua peneliti telah membaca dan mempelajari data. Ketiga peneliti mengklasifikasi data menjadi beberapa tema, yaitu tiga pilar utama transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Kemudian 4 pilar pendukung yaitu teknologi, regulasi, akuntabilitas, dan kepercayaan. Keempat peneliti membangun interpretasi data dengan menggunakan pandangan peneliti mengenai perspektif dari Bernard Stiegler. Terakhir, peneliti mempresentasikan data yang dengan menggunakan teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran teknologi informasi begitu krusial hingga tak dapat dielakkan pemerintahan modern sekarang harus didukung dan mengembangkan teknologi informasi dalam menjalankan fungsinya seperti memberikan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Desa, sekarang telah otonom dan boleh berkolaborasi dengan pemerintah pusat-pemerintah kabupaten dan juga dengan sector swasta, pada gilirannya sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Desa untuk mengembangkan teknologi informasi untuk menjalankan kewajiban transparansi

dan akutanbilitas serta menciptakan inovasi. Hal ini disampaikan oleh Stiegler bahwa dalam kehidupan di lingkungan Pemerintahan, memang tidak bisa terlepas dari alat dan teknologi,. Stiegler berargumen bahwa tidak ada manusia tanpa bantuan alat: bahwa sebagai manusia yang terus berkembang selalu dikaitkan dengan alat instrumen dan teknologi. Hubungan ini memberikan manusia sebagai takdir; semua yang manusia miliki, dalam hal kontrol mereka mengenai alam, produksi komoditas dan kapitalisasi kehidupan, semua tercapai melalui teknologi yang efeknya tetap berpotensi menimbulkan bencana. Eksistensi manusia sangat dipengaruhi oleh alat dan teknologi (Stiegler, 1998)

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintahan desa sangat membutuhkan sarana teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan publik, sebagai akses menyebarkan informasi, membangun koneksi dengan masyarakat, untuk mengembangkan perekonomian desa, juga untuk transparansi-akuntabilitas dan untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa inovasi tranparansi Pemerintah Desa Pejambon dapat dikatakan memberikan dampak positif terhadap lingkungan desa. Penerapan awal inisiatif *open government*, Pemerintah Desa dapat menerapkan transparansi anggaran yang mendapatkan pujian baik dari OGP dan Pemerintah Pusat, yang kemudian mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membangun wisata edukasi Pejambon yang membantu meningkatkan perekonomian desa dan mendukung untuk meningkatkan berbagai pelayanan di desa seperti transaksi pembayaran digital, dan pelayanan akses wifi murah. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis data, penerapan *open government* di Desa Pejambon memang memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa.

Bila dikaji dalam perpektif Pharmakon dari Stiegler yang merupakan murid Derrida, bahwa itu hanyalah kepercayaan semu. Konsep *pharmakon* adalah sebuah kontradiksi antara efek penyembuhan dan racun. Bagi Derrida, *pharmakon* mengungkapkan ambiguitas mendasar bahwa teks dan waktu merupakan obat sekaligus racun (Derrida, 1993).

Sejalan dengan Derrida, secara tegas Stiegler menjelaskan *pharmakon* sebagai sesuatu yang memungkinkan untuk memberikan efek penyembuhan yang dapat memperbaiki sesuatu. Tetapi juga harus diperhatikan: kekuatannya bersifat menyembuhkan sampai tidak bisa diukur dan bahwa itu juga bisa memberi efek kehancuran (Stiegler, 2013). Menurut pendapat dari Abbinnett (2015), Pharmakon bagi Stiegler adalah pada kehidupan manusia adanya hubungan dengan teknologi, pada kenyataannya, memiliki efek racun dan penyembuhan. Jadi dari perspektif ini dapat dikatakan bahwa teknologi dalam lingkungan pemerintahan selain memberikan manfaat ternyata memberikan dampak buruknya tersendiri. Dari penyajian data dan analisis data, ternyata memang ada efek racun dan kelemahan dalam penerapan *open government* yang terlalu fokus pada inovasi dan teknologi. Terkait keberlanjutan, berdasarkan hasil penelitian, telah ditemukan bahwa keberlanjutan program Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh untuk mempertahankan jejaring koneksi dengan LSM.

Keberlanjutan, didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga saat ini dan masa depan (Hoyos et al., 2010). Bahwa kinerja dalam konteks keberlanjutan lokal dapat secara konseptual didefinisikan mirip dengan kinerja organisasi, dalam arti perbandingan output pemerintah dan hasil dengan hasil, sasaran, atau sasaran yang diinginkan (Deslatte & Swann, 2020).

Inisiatif *open government* yang awalnya telah dapat memodernkan Pemerintah Desa Pejambon dan menjadikan Pejambon sebagai contoh untuk desa lain di Kabupaten Bojonegoro untuk menjadi lebih modern dalam melaksanakan fungsi pemerintahan menjadi lebih maju dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten dapat membangun koneksi dengan Pemerintah Pusat dan OGP melalui program *open government*. Pemerintah Desa dapat membangun berbagai inovasi, sehingga seharusnya menurut peneliti, inisiatif *open government* layak untuk dilanjutkan. Tetapi pada kenyataannya keberlanjutan ternyata masih mengalami masalah. Program Renaksi ini dibangun pada era Bupati Bapak Suyoto. Pergantian Bupati, *open government* tidak lagi menjadi prioritas. Diganti dengan konsep pemerintahan *Transparansi Governemnt Akuntabel* (TGA) yang sebenarnya sama saja dengan konsep *open government* yaitu pemerintahan yang transparan. Hanya saja karena Bojonegoro sudah tidak ada lagi menggunakan frame *open government*, maka sudah tidak ada lagi renaksi *open government*, dan tidak ada lagi koneksi dengan OGI dan OGP.

Bagi peneliti bahwa keberlanjutan tetap menjadi kendala karena *open government*, TGA ternyata beda jejaring dan berbeda platform sehingga pergantian dari OGI-OGP ke TGA harus berangkat dari awal lagi. Penggunaan platform TGA, Pemerintah Kabupaten tidak bisa melihat bermitra dengan OGP dan OGI renaksi *open government* dari Bupati sebelumnya. Menurut peneliti, keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon juga didukung dengan adanya koneksi dengan Pemerintah Pusat melalui OGI dan OGP. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, organisasi internasional OGP, dan Pemerintah Desa yang sekarang memiliki

otonominya sendiri memberikan kontribusi dalam pembangunan inovasi Pemerintah Desa seperti wahana wisata edukasi. Penerapan *open government* di tingkat pemerintahan lokal desa sering mengalami masalah anggaran dan SDM. Dalam inovasi memang membutuhkan adanya koneksi dengan tingkat pemerintahan yang lebih besar seperti Pemerintahan Pusat, dan koneksi dengan swasta, dan LSM. Tentu saja untuk itu membutuhkan anggaran besar dan tanpa hibah dari pihak stakeholder pasti tidak bisa berjalan. Melalui inisiatif *open government* desa Pejambon mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Pusat karena kemampuan Pemerintah Desa dinilai positif membangun transparansi dengan mandiri. Tetapi adanya renaksi *open government* telah dibatalkan, maka koneksi Pemerintahan Desa dengan OGI dan OGP menjadi hilang. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kabupaten, telah ditemukan bahwa ASN di Pemerintah Kabupaten harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan dengan program kerja Bupati yang baru. Jadi salah satu masalah dari pelaksanaan *open government* adalah keberlanjutan. Karena fokus pada pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi, Pemerintahan Kabupaten dengan mudahnya mengganti renaksi dari pemerintahan sebelumnya.

Pada saat penelitian dilakukan tidak terlihat adanya jejaring dan koneksi yang mendukung inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon. Kemudian karena Pemerintah Desa Pejambon berada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mau tidak mau Pemerintah Desa Pejambon harus membatalkan program renaksi *open government*. Berdasarkan wawancara dengan pihak Pemerintah Desa cukup disayangkan renaksi *open government* tidak dilanjutkan. Menurut pendapat dari Harrington (2016) keberlanjutan dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk mempertahankan atau

meningkatkan keadaan dan ketersediaan bahan atau kondisi yang diinginkan dalam jangka panjang. Definisi ini mempertahankan karakteristik keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan yang sering dikutip sebagai berorientasi jangka panjang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan sangatlah penting dalam implementasi *open government* atau program kebijakan apapun, terutama di negara demokrasi dimana pergantian pemerintahan cukup sering terjadi. Dari pergantian kepemimpinan tersebut, Pemerintah Daerah harus berpikir ulang untuk melakukan pembangunan jangka panjang. Kesediaan untuk melanjutkan program dan pembangunan pemerintahan sebelumnya, dan faktor penting untuk mendukung keberlanjutan adalah kepemimpinan. Dapat dipahami bahwa masalah keberlanjutan program pembangunan disini ada peran utama, yaitu kepemimpinan. Bupati yang baru tidak ingin melanjutkan program Bupati yang sebelumnya.

Masalah kedua dalam pelaksanaan teknologi dalam Pemerintahan Desa adalah kemampuan dan minat masyarakat. Telah ditemukan bahwa ternyata masyarakat desa memang masih banyak yang tidak mengerti dan tidak mampu untuk menerjemahkan data-data transparansi anggaran yang telah diupload di web desa. Bahwa masyarakat desa terutama perempuan di desa sebenarnya sudah paham bahwa desa sekarang telah transparan mengenai anggaran. Transparansi desa telah fungsional sesuai dengan Undang-Undang Desa, hal itu terlihat pada kasus desa mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa telah melaksanakan alokasi anggaran sesuai yang telah disepakati berdasarkan Musrembang dan Jandom Bareng. Masyarakat desa telah memahami itu. Tetapi tetap ditemukan bahwa masih ada masyarakat desa yang belum mampu menerjemahkan data yang tersebar,

terutama pada golongan perempuan di desa. Berdasarkan hasil pengumpulan data, sudah ada pelatihan untuk masyarakat desa yang diadakan oleh BI sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BI, tetapi masih ada masyarakat yang belum mampu menerjemahkan data yang tersebar. Masalah tersebut telah dijelaskan karena kurangnya SDM dan anggaran. Kemudian telah dijelaskan bahwa Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten menjelaskan bahwa tidak mungkin memberikan pelatihan kepada seluruh masyarakat desa karena keterbatasan SDM, anggaran dan waktu. Akibatnya web desa dan komputer umum di balai desa jarang diakses oleh masyarakat desa. Ada kendala krusial lainnya, yaitu minat dari masyarakat desa.

Telah ditemukan bahwa ternyata masih rendahnya minat dan kemauan masyarakat desa untuk mengakses web desa terutama dari golongan petani desa. Berdasarkan hasil wawancara petani desa Pejambon Sebagian besar tidak berminat untuk mengawasi transparansi anggaran desa karena kesibukan pekerjaan dan menghadapi masalah pertanian di Desa Pejambon. Bagi masyarakat desa, bahwa Pemerintah Desa telah transparan itu sudah cukup menjadi alasan untuk percaya kepada Pemerintah Desa. Ini berpotensi bahwa transparansi desa menjadi alat propaganda untuk membuat masyarakat desa percaya kepada Pemerintah Desa. Akibatnya berbagai upaya dan anggaran dialokasikan Pemerintah Desa untuk membangun web desa dan untuk komputer umum di Balai Desa untuk mengakses web desa menjadi kurang manfaatnya. Inovasi Pemerintahan Desa seperti web desa dan komputer umum hanya menjadi alat untuk memodernkan penyebaran berita yang jarang atau tidak pernah diakses oleh masyarakat desa. Pada dasarnya pelaksanaan transparansi anggaran desa memang telah mencapai kepercayaan masyarakat desa, tetapi menurut peneliti kepercayaan tersebut tidak ada artinya

jika masyarakat desa tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk ikut aktif dalam pelaksanaan pengawasan anggaran desa. Selanjutnya, menurut peneliti masalah berikutnya adalah mengenai kendali data telah dijelaskan bahwa transparansi desa yang dikendalikan oleh PPID sebagai perangkat desa yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Desa akan berpotensi menjadi alat propaganda Pemerintah Desa. Karena menurut pengamatan peneliti, setiap berita yang disebar oleh PPID secara keseluruhan adalah berita baik saja seperti berita mengenai prestasi Pemerintah Desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran desa memang memberikan inovasi desa dan kurang lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat desa dan sebagai sarana akuntabilitas kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena secara berkala Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengawasi alokasi anggaran Pemerintah Desa melalui web desa. Kemudian perlu ditekankan bahwa berbeda dengan Pemerintahan Desa lainnya di Bojonegoro, Pejambon dapat membangun web desa secara mandiri. Tetapi kemampuan transparansi tersebut menurut peneliti harus diimbangi oleh minat dan kemampuan masyarakat desa. Transparansi berbasis teknologi tidak lebih hanya memodernkan penyebaran data jika tidak dapat diakses oleh masyarakat desa. Konsep kesederhanaan data memang telah dicapai karena dalam transparansi disarankan bahwa informasi yang tersedia untuk lebih sederhana (Larsson & Heintz, 2020). Dan berdasarkan wawancara baik dari Pemerintah Desa Pejambon, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan BI berpendapat bahwa data transparansi anggaran telah disusun dengan sejelas dan sesederhana mungkin. Tetapi tetap saja ditemukan masalah mengenai minat dan kemampuan masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan *open government* juga perlu ditekankan mengenai minat dan kemampuan

masyarakat dalam menjalankan fungsi transparansi. Karena jika transparansi berbasis teknologi tidak diimbangi oleh kemampuan masyarakat. Sudah seharusnya dalam sektor Pemerintahan yang sedang mengembangkan *open government* harus juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat agar masyarakat juga berminat dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan data transparansi yang tersebar. Bukan hanya focus pada pengembangan teknologi dan inovasi saja (Dommett & Power, 2023).

Masalah Ketiga adalah mengenai kesenjangan kekuatan dan kewenangan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Selain mengalami masalah mengenai kemampuan dan minat masyarakat dalam hal transparansi anggaran, peneliti juga menemukan ada juga masalah dalam hal partisipasi dan kolaborasi. Dalam mengembangkan partisipasi dan kolaborasi, Pejambon memiliki 2 (dua) media yaitu Musrembang dan Jandom Bareng. Untuk membangun minat masyarakat, Pemerintah Desa memiliki Lembaga Desa LPMD dan juga melibatkan tokoh masyarakat. Bumdes juga telah berkolaborasi dengan BI semenjak kebijakan Renaksi *Open Government*. Faktor kendalanya ada pada rendahnya minat masyarakat. Dari hasil penyajian data dan analisis telah ditemukan meskipun sudah ada media Musrembang dan Jandom Bareng keputusan akhir dalam melakukan pembangunan desa tetap diambil secara sepihak oleh Pemerintah Desa. Contoh yang bisa diambil adalah mengenai pertanian desa. Bahwa Kelompok Tani telah beberapa kali mengajukan usulan untuk mengembangkan pertanian tapi tidak ada yang terealisasi. Ada media untuk memberikan usulan, tetapi realisasi pembangunan tidak ada karena diambil secara sepihak oleh Pemerintah Desa. Bahwa dalam memutuskan kebijakan berbasis partisipasi dan kolaborasi, setiap pihak baik dari pemerintah, swasta,

masyarakat, dan stakeholders terkait perlu adanya perbedaan perspektif, pendapat, rasa saling ketergantungan satu sama lain. Kekuatan dan kemampuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan (Innes & Booher, 2018). Selanjutnya proses partisipasi dan kolaborasi harus didasari oleh filosofi tentang persamaan sosial, dan keadilan sosial (Kassen, 2017). Jadi baik dalam Musrebang dan Jandom Bareng, atau pada partisipasi dan kolaborasi pada umumnya, penting untuk menanamkan bahwa dalam pembangunan dan inovasi harus diutamakan adanya persamaan dan keadilan social. Kemudian juga sangat penting untuk menanamkan rasa saling membutuhkan dan juga ketergantungan dalam proses partisipasi dan kolaborasi. Juga sangat penting untuk mengembangkan keseimbangan pengaruh dan kewenangan.

Masalah keempat adalah mengenai kesenjangan antara Bumdes dan Kelompok Tani. Dalam pengelolaan ekonomi desa ada dua sektor utama yaitu pertanian yang didukung oleh Kelompok Tani, dan wisata edukasi Pejambon yang dikelola oleh Bumdes. Berdasarkan pendapat dari Wirtz dan Birkmeyer (2015), dijelaskan bahwa pelaksanaan *open government* dapat melahirkan inovasi dan berdasarkan analisis sebelumnya, inisiatif *open government* dapat melahirkan beberapa inovasi salah satunya adalah kemajuan perekonomian desa dengan membangun wisata edukasi. Selain itu Bumdes sebagai Lembaga Desa yang mengelola wisata edukasi juga dapat meningkatkan pelayanan publik seperti pelayanan untuk pembayaran iuran seperti PLN, BPJS, dan PDAM. Bumdes juga dapat membangun pelayanan wifi terjangkau untuk masyarakat desa. Tetapi fokus pada inovasi dan teknologi juga menghasilkan masalah sesuai yang telah dijelaskan oleh Stiegler mengenai Pharmakon (Stiegler, 2013). Masalah tersebut adalah mengenai kesenjangan teknologi antara Bumdes dan Kelompok

Tani. Berdasarkan hasil penyajian data, terlihat jelas terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara Bumdes dan Kelompok Tani baik dari segi SDM, perangkat teknologi, dan anggaran. Terdapat masalah kesenjangan pendapatan, kesenjangan teknologi, kesenjangan ilmu pengetahuan. Dari segi anggaran, Bumdes mendapatkan anggaran sebesar Rp 100.000.000 pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian Bumdes menjelaskan pernah menerima bantuan baik dari pihak Pemerintah Kabupaten dan juga Pemeintah Pusat dengan total sebesar Rp 1,5 Milliar. Total anggaran tersebut jauh berbeda dengan Kelompok Tani yang hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 juta sampai 2 Juta pertahun. Pada tahun 2019, kelompok tani mendapatkan dana Rp 2.000.000 berdasarkan Perubahan APBDes Tahun 2019. Pada tahun 2020, Kelompok Tani mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.500.000. Dari penyajian data tersebut sudah mulai terlihat bahwa ada kesenjangan antara Bumdes dan Kelompok Tani. Untuk membangun inovasi atau paling tidak untuk memberdayakan kelompok tani tentu saja membutuhkan anggaran yang cukup besar, tetapi Kelompok Tani hanya mendapatkan anggaran yang sedikit terutama jika dibandingkan dengan Bumdes. Menurut peneliti, disini mulai terlihat bahwa prioritas pembangunan inovasi desa agar menjadi lebih modern membuat sector pertanian menjadi terpinggirkan. Bukan hanya anggaran, Bumdes dan Kelompok Tani Pejambon juga mengalami kendala kesenjangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kesenjangan akses ke teknologi (misalnya perangkat, informasi, dan Internet) dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya terjadi di antara berbagai kelompok orang karena perbedaan pendidikan, lokasi geografis, usia, etnis, dan pendapatan (Kady & Vadeboncoeur, 2013). Dari segi usia, Bumdes Pejambon diisi oleh anggota yang masih muda dan lebih paham mengenai

teknologi informasi, sedangkan anggota Kelompok Tani lebih dominan bapak-bapak setengah baya yang lebih buta teknologi informasi.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan tersebut karena berdasarkan hasil wawancara dengan Bumdes maupun Kelompok Tani dan pengamatan peneliti, dalam menjalankan fungsinya Bumdes lebih memanfaatkan teknologi informasi jika dibandingkan dengan Kelompok Tani. Bumdes memanfaatkan berbagai teknologi untuk menjalankan tugasnya seperti Menyusun laporan kepada Pemerintah Desa atau memberikan pelayanan sarana pembayaran seperti PLN, PDAM, dan BPJS, dan mampu memberikan pelayanan Wifi kepada masyarakat desa. Jika dibandingkan dengan Kelompok Tani, Lembaga Desa ini sama sekali tidak menggunakan teknologi informasi. Bahkan untuk Menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran Kelompok Tani masih menggunakan data manual. Teknologi informasi yang digunakan Kelompok Tani masih hanya terbatas dengan pemakaian HP dan juga WA saja. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kelompok Tani, dapat disimpulkan bahwa anggota Kelompok Tani tidak terlalu peduli dengan pemakaian teknologi informasi dan transparansi desa. Mereka lebih fokus dengan pekerjaan mereka. Selain itu anggaran yang didapatkan oleh Kelompok Tani memang sangat sedikit. Kelompok Tani hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 juta sampai 2 Juta pertahun. Pada tahun 2019, kelompok tani mendapatkan dana Rp 2.000.000 berdasarkan Perubahan APBDes Tahun 2019. Pada tahun 2020, Kelompok Tani mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.500.000. Dari penjelasan tersebut sudah terlihat jelas adanya kesenjangan yang cukup lebar antara Bumdes dan Kelompok Tani. Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan LSM BI, mereka melihat bahwa Pejambon

dapat membangun inovasi melalui Wisata Edukasi Desa dan pelayanan berbasis digital dan internet kepada masyarakat desa. Tetapi ternyata terlihat masih ada golongan yang terpinggirkan dalam upaya membangun inovasi dalam peningkatan ekonomi desa yaitu para Petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani, bahwa wajar jika Pemerintah Desa memberikan anggaran yang sedikit kepada Kelompok Tani. Karena anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pertanian dinilai cukup besar. Pendapat ini dapat memberikan implikasi bahwa pihak Kelompok Tani memang memaklumi bahwa pihak Pemerintah Desa juga memiliki urgensi untuk pembangunan di sektor lain, atau memang Kelompok Tani tidak dapat mengandalkan pihak Pemerintah Desa. Guilo dan Vecchi (2023) berpendapat bahwa perlu adanya pengembangan infrastruktur teknologi untuk mendukung pemerintahan modern. Jadi dalam menjalankan fungsinya dalam meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan ekonomi baik dari sector pertanian, UMKM dan wisata edukasi Pejambon harus menggunakan teknologi informasi. Di satu pihak telah dijelaskan Bumdes Pejambon telah menggunakan media teknologi informasi untuk menjalankan fungsinya, seperti Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan wisata edukasi, dan pelayanan mengenai UMKM, dan pelayanan kepada masyarakat seperti Wifi. Bumdes Pejambon telah mampu menggunakan teknologi informasi dan telah mampu memodernkan Pejambon untuk mendapatkan koneksi internet dengan harga terjangkau. Tetapi sebaliknya, Kelompok Tani masih belum bisa memanfaatkan teknologi informasi. Kelompok Tani. Bahkan dalam menjalankan salah satu fungsi dalam Menyusun laporan Kelompok Tani masih menggunakan proses manual. Jadi meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa Pejambon telah mampu

menggunakan teknologi informasi, tetapi pada kenyataannya masih ada salah satu Lembaga desa yang masih terpinggirkan dalam hal teknologi informasi.

Berdasarkan framework dari Wirtz dan Birkmeyer (2015), telah ditemukan bahwa penerapan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dengan dukungan teknologi, kepercayaan, hukum, dan kauntabilitas terbukti telah memberikan dampak positif atau *public value* jika diterapkan di pemerintahan local. Pemerintah Desa dapat membangun koneksi dengan Pemerintah Pusat dan LSM internasional OGP. Mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat untuk membangun wisata edukasi. Kemudian koneksi dengan OGP dapat digunakan untuk sarana pelatihan Perangkat Desa. Kemudian sarana Musrembang dan Jandom Bareng juga menjadi sarana untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan juga meningkatkan kepercayaan pemerintah. Tetapi dari hasil penelitian, pemakaian teknologi informasi ternyata memberi dampak buruknya tersendiri. Fokus pada teknologi dalam lingkungan pemerintahan membuat pemerintahan tidak dapat melihat adanya koneksi yang lahir. Sehingga keberlanjutan *open government* menjadi bermasalah dan koneksi yang telah dibangun menjadi hilang. Fokus pada penyebaran data digital menyebabkan masih ada golongan masyarakat yang tidak mampu atau enggan mengakses data yang tersebar, sehingga manfaat dari transparansi menjadi dipertanyakan. Kemudian data yang disebar secara sepihak oleh Pemerintah harus dipertanyakan kebenarannya karena ada potensi hanya data yang bersifat baik yang tersebar. Meskipun adanya sarana untuk membangun partisipasi dan kolaborasi, penting juga untuk mengembangkan minat dan kemampuan masyarakat. Juga sangat penting untuk membangun keseimbangan kekuatan, kebutuhan dan kewenangan. Inovasi dalam pemerintahan juga berpotensi melahirkan

golongan yang termarjinalkan. Oleh karena itu peneliti perlu menambahkan beberapa factor pendukung dalam framework *open government* agar *public value* benar benar tercapai. Pertama mengenai minat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses data transparansi dan juga dalam proses partisipasi dan kolaborasi. Kedua dalam *open government* penting untuk mengembangkan keberlanjutan dengan dukungan kepemimpinan karena di negara demokrasi pergantian kepemimpinan adalah rutinitas. Ketiga dalam proses *open government* juga harus mengembangkan proses pemerataan agar inovasi dan perubahan positif dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat.

SIMPULAN

Penerapan *open government* memang dapat mencapai *public value*, tetapi, jika dikaji dengan konsep poststrukturalisme dari Bernard Stiegeler bahwa efek dari teknologi informasi terdapat efek penyembuhan, bahwa *public value* dapat tercapai dengan menciptakan modernisasi Pemerintahan Desa. Tetapi, ternyata ditemukan juga efek racunnya. Bahwa penerapan teknologi informasi dalam lingkungan Pemerintahan selain memberikan *public value*, tetapi juga melahirkan masalahnya tersendiri, yaitu masalah pergantian pemimpin yang berdampak pada pergantian kebijakan. Renaksi *Open government* dibatalkan secara keseluruhan dan diganti dengan program TGA secara substansial antara *open government* dan TGA sama saja tetapi berbeda manajemen saja. Pada gilirannya jejaring antara Kabupaten Bojonegoro dan Desa Pejambon dengan OGP terputus karena Bojonegoro sudah tidak memakai framework *open government*. Terlihat disini, bahwa *open government* maupun pemerintahan berbasis digital pada prinsipnya bukan hanya teknologi informasi saja tetapi juga mengenai partisipasi dan kolaborasi yang akan

menghasilkan jejaring yang memberikan manfaat untuk Pemerintah Desa. Terutama pada tingkat pemerintahan lokal seperti Pemerintah Desa yang sering mengalami kendala di bidang sumber anggaran dan SDM. Jadi dalam *open government* atau kebijakan lainnya variabel keberlanjutan sangatlah penting. Ke depan perlu sarana untuk mendukung keberlanjutan di negara yang menganut sistem demokrasi dimana pergantian pemerintahan menjadi rutinitas. Oleh karena itu perlu adanya kepemimpinan yang kuat dan visioner menjadi penting. Selanjutnya, dalam penerapan *open government* kepercayaan masyarakat tidaklah cukup, tetapi juga perlu dukungan adanya penekanan minat dan kemampuan untuk berpartisipasi baik pengawasan, transparansi anggaran maupun proses pembangunan desa, karena telah ditemukan meskipun kebijakan *Renaksi Open Government* telah membangun kepercayaan masyarakat desa, tetapi kebanyakan masyarakat desa tidak terlalu peduli dengan transparansi desa, dan mereka percaya saja kebijakan dan pelaksanaan pemimpin desanya. Meskipun sudah ada sarana masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa seperti Musrembang dan Jandom Bareng, keputusan akhir tetap di ambil secara sepihak oleh Pemerintah Desa. Fakta ini menjelaskan bahwa transparansi desa hanya menjadi alat propaganda untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa, dan media seperti Musrembang dan Jandom Bareng menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan. Penting untuk membangun pelatihan kepada masyarakat desa. Perlu juga dilakukan adanya keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa. Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa dalam proses pembangunan inovasi ternyata berpotensi melahirkan kesenjangan. Kelompok Tani

termarginalkan dalam alokasi anggaran, akses teknologi, dan tentang SDM. Oleh karena itu pembangunan inovasi juga jangan mengabaikan sektor lain seperti pertanian desa sehingga terjadi adanya kesenjangan pada lingkungan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada promotor penulis Bapak Falih Suaedi dan juga Bapak Bintoro Wardiyanto sebagai co promotor penulis. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada informan penelitian yaitu Bapak Kusnandaka sebagai Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro. Kemudian Bapak Sufyan sebagai Perangkat Desa Pejambon yang berkenan mendampingi penulis dari awal penelitian sampai selesai. Kemudian para informan penelitian ini yang telah berkenan untuk memberikan data yaitu, Bapak Saiful Huda sebagai kepala BI, Bapak Gampang Pranowo, ketua Lembaga Kebudayaan, Bapak Andi ketua Bumdes Pejambon, Bapak Ali Suhadi anggota Kelompok Tani, dan Bapak Munasir ketua LPMD Pejambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbinnett, R. (2015). The Politics of Spirit in Stiegler's Techno-Pharmacology. *Theory, Culture & Society*, 32(4), 65–80. <https://doi.org/10.1177/0263276414536748>.
- Stiegler, B. (1998). *Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus*, trans. R Beardsworth and G Collins. Stanford University Press.
- Stiegler, B. (2011). *The Decadence of Industrial Democracies: Disbelief and Discredit Vol. 1*, trans. D Ross and S Arnold. Polity Press.
- Stiegler, B. (2013). *What Makes Life Worth Living: On Pharmacology*, trans. DRoss. Polity.

- Choi, D., & Berry, F. S. (2021). Can Infused Publicness Enhance Public Value Creation? Examining the Impact of Government Funding on the Performance of Social Enterprises in South Korea. *The American Review of Public Administration*, 51(3), 167–183. <https://doi.org/10.1177/0275074020983253>.
- Hoyos, D., Bermejo, R., & Arto, I. (2010). Sustainable Development in the Brundtland Report and Its Distortion: Implications for Development Economics and International Cooperation. In A. A. K. Unceta (Ed.), *Development Cooperation: Facing the Challenges of Global Change*. University of Nevada.
- De Blasio, E., & Selva, D. (2016). Why Choose Open Government? Motivations for the Adoption of Open Government Policies in Four European Countries. *Policy & Internet*, 8(3), 225–247. <https://doi.org/10.1002/poi3.118>.
- Deslatte, A., & Swann, W. L. (2020). Elucidating the Linkages Between Entrepreneurial Orientation and Local Government Sustainability Performance. *American Review of Public Administration*, 50(1), 92–109. <https://doi.org/10.1177/0275074019869376>.
- Di Giulio, M., & Vecchi, G. (2023). Implementing digitalization in the public sector. Technologies, agency, and governance. *Public Policy and Administration*, 38(2), 133–158. <https://doi.org/10.1177/09520767211023283>.
- Dommett, K., & Power, S. (2023). Monitoring Digital Election Campaigns: Assessing the Transparency Ecosystem in the United Kingdom. *Politics*. <https://doi.org/10.1177/02633957231156084>.
- Esteve Sanz. (2014). Open Governments and Their Cultural Transitions. In M. G. Hernandez (Ed.). *Open Government Opportunities and Challenges for Public Governance*. Springer.
- Fraundorfer, M. (2017). The Open Government Partnership: Mere Smokescreen or New Paradigm?. *Globalizations*, 14(4), 611–626. <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1236463>.
- Fusi, F., Zhang, F., & Liang, J. (2023). Unveiling Environmental Justice Through Open Government Data: Work in Progress for Most US States. *Public Administration*, 101(3), 1088–1114. <https://doi.org/10.1111/padm.12847>.
- Hansson, K., Belkacem, K., & Ekenberg, L. (2015). Open Government and Democracy. *Social Science Computer Review*, 33(5), 540–555. <https://doi.org/10.1177/0894439314560847>.
- Harrington, L. M. B. (2016). Sustainability Theory and Conceptual Considerations: A Review of Key Ideas for Sustainability, and the Rural Context. *Papers in Applied Geography*, 2(4), 365–382. <https://doi.org/10.1080/23754931.2016.1239222>.

- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., Hrdinová, J., & Pardo, T. (2011). Open government and e-government. *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times*, 245–253. <https://doi.org/10.1145/2037556.2037597>.
- Hartley, J., Alford, J., Knies, E., & Douglas, S. (2017). Towards an empirical research agenda for public value theory. *Public Management Review*, 19(5), 670–685. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1192166>.
- Heimstädt, M., & Dobusch, L. (2020). Transparency and Accountability: Causal, Critical and Constructive Perspectives. *Organization Theory*, 1(4), 1-15. <https://doi.org/10.1177/2631787720964216>.
- Hitaf R Kady, & Jennifer A. Vadeboncoeur. (2013). Digital divide. In *Salem Press Encyclopedia*. Salem Press.
- Isabell Egger-Peitler, & Tobias Polzer. (2014). Open Data: European Ambitions and Local Efforts. Experiences from Austria. In M. G. Hernandez (Ed.), *Open Government Opportunities and Challenges for Public Governance* (p. 137). Springer.
- Jacques Derrida. (1993). *Dissemination*, trans. B Johnson. Athlone Press.
- John W. Creswell, & Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Jörn von Lucke, & Katharina Große. (2014). Open Government Collaboration Opportunities and Challenges of Open Collaborating With and Within Government. In M. G. Hernandez (Ed.), *Open Government Opportunities and Challenges for Public Governance* (p. 189). Springer.
- Judith E. Innes, & David E. Booher. (2018). *Planning with Complexity An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy* (2nd ed.). Routledge.
- Kassen, M. (2017). Understanding Transparency of Government From a Nordic Perspective: Open Government and Open Data Movement as a Multidimensional Collaborative Phenomenon in Sweden. *Journal of Global Information Technology Management*, 20(4), 236–275. <https://doi.org/10.1080/1097198X.2017.1388696>.
- Kouppanou, A. (2015). Bernard Stiegler's Philosophy of Technology: Invention, decision, and education in times of digitization. *Educational Philosophy and Theory*, 47(10), 1110–1123. <https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1045819>.
- Krick, E. (2022). Citizen Experts In Participatory Governance: Democratic and Epistemic Assets of Service User Involvement, Local Knowledge and Citizen Science. *Current Sociology*, 70(7), 994–1012. <https://doi.org/10.1177/00113921211059225>.

- Larsson, S., & Heintz, F. (2020). Transparency in Artificial Intelligence. *Internet Policy Review*, 9(2), 1–16. <https://doi.org/10.14763/2020.2.1469>.
- Lawrence Neuman. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches seventh edition* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Linda Finlay. (2006). *Going Exploring': The Nature of Qualitative Research*", *Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choices*. . John Wiley & Sons Ltd.
- Marc Garriga-Portolà, & Júlia López Ventura. (2014). The Role of Open Government in Smart Cities. In M. G. Hernandez (Ed.), *Open Government Opportunities and Challenges for Public Governance*. Springer.
- Moore, M. H. (2014). Public Value Accounting: Establishing the Philosophical Basis. *Public Administration Review*, 74(4), 465–477. <https://doi.org/10.1111/puar.12198>.
- O'Hara, K. (2015). Government open data and transparency: Oakeshott, civil association and the general will. *Global Discourse*, 5(1), 135–152. <https://doi.org/10.1080/23269995.2014.903720>.
- Pablo Sanabria, Cristian Pliscoff, & Ricardo Gomes. (2014). E-Government Practices in South American Countries: Echoing a Global Trend or Really Improving Governance? The Experiences of Colombia, Chile, and Brazil. . In M. G. Hernandez (Ed.), *Open Government Opportunities and Challenges for Public Governance*. Springer.
- Pérez-Durán, I. (2023). Twenty-five Years of Accountability Research in Public Administration: Authorship, Themes, Methods, And Future Trends. *International Review of Administrative Sciences*.
- Ruijter, E., Détienne, F., Baker, M., Groff, J., & Meijer, A. J. (2020). The Politics of Open Government Data: Understanding Organizational Responses to Pressure for More Transparency. *The American Review of Public Administration*, 50(3), 260–274. <https://doi.org/10.1177/0275074019888065>.
- Ruvalcaba-Gomez, E. A., Criado, J. I., & Gil-Garcia, J. R. (2023). Analyzing open government policy adoption through the multiple streams framework: The roles of policy entrepreneurs in the case of Madrid. *Public Policy and Administration*, 38(2), 233–264. <https://doi.org/10.1177/0952076720936349>.

- Schmidhuber, L., & Hilgers, D. (2018). Unleashing Innovation beyond Organizational Boundaries: Exploring Citizensourcing Projects. *International Journal of Public Administration*, 41(4), 268–283. <https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1263656>.
- Schmidhuber, L., Piller, F., Bogers, M., & Hilgers, D. (2019). Citizen Participation in Public Administration: Investigating Open Government for Social Innovation. *R and D Management*, 49(3), 343–355. <https://doi.org/10.1111/radm.12365>.
- Shepherd, E. (2015). Freedom of Information, Right to Access Information, Open Data: Who is at the Table? *The Round Table*, 104(6), 715–726. <https://doi.org/10.1080/00358533.2015.1112101>.
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 381–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>.
- Wirtz, B. W., Piehler, R., Thomas, M.-J., & Daiser, P. (2016). Resistance of Public Personnel to Open Government: A cognitive theory view of implementation barriers towards open government data. *Public Management Review*, 18(9), 1335–1364. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1103889>.